

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik kinerja anggaran berkonsep *value for money* sebelumnya sudah pernah dilakukan. Ringkasan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **I Desak Nyoman Tri Wandari, Edy Sujana, dan I Made Pradana Adi Putra (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu, dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Seluruh pegawai pada 28 instansi di Kabupaten Buleleng. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepala Instansi Pemerintahan dan Bendahara pada setiap Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, ketepatan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi

Pemerintah di Kabupaten Buleleng, akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan konsep *value for money*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dilakukan pada instansi pemerintah di kabupaten Buleleng. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pemerintah kota Surabaya.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan tahun 2015. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2019.

2. **Fanny Jitmau , Lintje Kalangi , Linda Lambey (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah Kabupaten Sorong). Penelitian ini menggunakan populasi yaitu wilayah generasi yang terdiri atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 responden yang terdapat pada 10 SKPD di pemerintah Kabupaten Sorong. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh peneliti Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen.
- b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten sorong. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pemerintah kota surabaya.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Sedangkan dalam peneliti sekarang menggunakan kinerja pemerintah kota sebagai variabel dependen.

3. **Nopriansyah Putra, Erlina, dan Tapi Anda Sari (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah ada pengaruh manajemen keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi kinerja pemerintah daerah dan apakah pengawasan bisa memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi kinerja pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), di 34 SKPD dengan populasi sebanyak 68 orang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nopriansyah Putra, Erlina, dan Tapi Anda Sarimenunjukkan bahwa, sebagian, pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara transparansi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. manajemen secara simultan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel independen akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
- b. penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti di SKPD.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen kinerja pemerintah daerah dengan pengawasan sebagai variabel moderating. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen kinerja pemerintah kota
- b. Peneliti terdahulu dilakukan penelitian pada tahun 2016. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan tahun 2019.
- c. Penelitian terdahulu dilakukan pada provinsi sumatera utara. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pemerintah kota surabaya.

4. Ni Wayan Novi Budiasni, Ni Made Wulan Sari Sanjaya, dan Ni Made Sri Ayuni (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja perusahaan AJB Bumiputea 1912 Cabang Singaraja. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua karyawan AJB Bumiputera 1912 Cabang Singaraja yang berjumlah 80 orang pegawai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Novi Budiasni, Ni Made Wulan Sari Sanjaya, dan Ni Made Sri Ayuni adalah akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja perusahaan AJB Bumiputra 1912 Cabang Singaraja semakin baik.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel independen akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan pengumpulan data dengan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen kinerja perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen kinerja pemerintah kota surabaya.
- b. Peneliti terdahulu dilakukan penelitian pada tahun 2016. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan tahun 2019.

5. Nurul Hutami Ningsih (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap akuntabilitas, transparansi dan kontrol dalam implementasi dan administrasi APBD dan dampaknya standar akuntansi pemerintah (variabel moderasi) tentang hubungan antara pengetahuan pada akuntabilitas, transparansi dan kontrol dalam implementasi dan administrasi APBD menggunakan konsep *value for money*. Penelitian ini dilakukan di 29 SKPD di Palembang tentang 5 petugas Pengguna Anggaran / Barang Pengguna di setiap SKPD. Data Analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan SPSS V.23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang akuntabilitas (X1) dan kontrol (X3) adalah signifikan dalam mempengaruhi implementasi dan administrasi APBD menggunakan konsep *value for money* (Y), sementara itu pengetahuan tentang transparansi (X2) ditemukan tidak signifikan. Sementara itu standar akuntansi pemerintah (SAP) (X4) tidak signifikan dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan tentang akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan Kontrol (X3) pada implementasi dan administrasi APBD menggunakan konsep nilai untuk uang (Y) dan relasi moderasi yang ditemukan adalah prediktor moderator. Efek akuntabilitas (x1), transparency (X2) dan kontrol (X3) pada implementasi dan administrasi APBD menggunakan nilai untuk uang (Y) menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah ditemukan kuat yang disesuaikan dengan R kuadratnya adalah 0,774 atau 77,4% sedangkan sisanya 23,6% dijelaskan oleh lainnya faktor di luar penelitian.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan konsep *value for money*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dilakukan pada SKPD kota Palembang. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pemerintah kota Surabaya.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan tahun 2017. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2019.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen pengawasan. Sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.

6. Budi S Purnomo, Cahaya Putri (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 SKPD di Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan konsep *value for money*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dilakukan pada pemerintah kota Bandung. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pemerintah kota Surabaya.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan tahun 2018. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2019.

7. **Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, & Husni Thamrin (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, dan transparansi, terhadap kinerja pengelolaan keuangan berkonsep *Value for Money* pada pemerintah di Kabupaten Dairi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi dan populasi berjumlah 37 orang. Hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *Value for Money*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen.

- b. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan konsep *value for money*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dilakukan pada pemerintah kabupaten Dairi. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada pemerintah kota Surabaya.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan tahun 2018. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2019.

8. **Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja instansi Inspektorat Aceh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Inspektorat Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 orang responden. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa adalah akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dan Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel independen akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen kinerja instansi inspektorat aceh. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen kinerja pemerintah kota surabaya.
- b. Peneliti terdahulu dilakukan penelitian pada tahun 2018. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan tahun 2019.

9. Cindy Arifani, Dr. Agustinus Salle, dan Andika Rante (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan merupakan suatu bagian dari kedisiplinan ilmu. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat mengelola anggaran secara akuntabel, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada Instansi Pemerintah Kota Jayapura. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cindy Arifani, Dr. Agustinus Salle, dan Andika Rante adalah Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok yang terdapat pada perwujudan Good Corporate Governance.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel independen akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

- b. Peneliti terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen kinerja instansi inspektorat aceh. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen kinerja pemerintah kota surabaya.
- b. penelitian terdahulu peneliti menggunakan tahun 2018. Sedangkan penelitian sekarang peneliti menggunakan tahun 2019.

10. **Victorinus Laoli (2019)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kabupaten Nias. Jenis penelitian ini assosiatif kausal, pengambilan data dengan kuesioner, dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* serta penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder dan diolah menggunakan alat bantu program statistik dengan pengujian analisis data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini adalah secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* sedangkan variabel transparansi secara parsial tidak berpengaruh. Secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan agar pemerintah Kabupaten Nias dapat meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas, sedangkan transparansi harus dapat diperbaiki dan perlu lebih terbuka. Secara simultan akuntabilitas dan transparansi sangat

berpengaruh terhadap kinerja anggaran sehingga perlu dipertahankan untuk memperoleh hasil kinerja atau pelayanan yang ekonomis, efisien dan efektif.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen.
- b. peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda.
- c. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan konsep *value for money*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Nias. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Pemerintah Kota Surabaya.
- b. Penelitian terdahulu teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik dengan rumus slovin.

Tabel 2.1
Tabel Matriks Penelitian

NO	NAMA PENELITI	TAHUN	INDEPENDEN					
			AB	TP	KW	PI	FPI	PKD
1	I Desak, Edy, I Made	2015	B	B	B	B	-	-
2	Fanny, Lintje, Linda	2015	TB	B	-	-	B	-
3	Nopri, Erlina, Tapi	2016	B	B	-	-	-	B
4	Ni Wayan, Ni Made, Sri	2016	B	B	-	-	-	-
5	Nurul Hutami Ningsih	2017	TB	-	-	-	-	-
6	Budi S, Cahaya P	2018	B	B	-	B	-	-
7	Redi, Marlon, Husni	2018	B	B	-	-	-	-
8	Zulkifli, Cut, Khairunnisa	2018	B	B	-	-	-	-
9	Cindy, Agustinus, Andika	2018	TB	-	-	-	-	-
10	Victorinus Laoli	2019	B	TB	-	-	-	-

Keterangan:

TB = TIDAK BERPENGARUH

B = BERPENGARUH

AB = AKUNTABILITAS

TP = TRANSPARANSI

KW = KETEPATAN WAKTU

PI = PENGAWASAN INTERNAL

FPI = FUNGSI PEMERIKSAAN INTERNAL

PKD = PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Teori keagenan merupakan suatu hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sulit terbangun, karena adanya benturan kepentingan. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, akan muncul apabila proporsi kepemilikan manajerial atas saham perusahaan tersebut kurang dari seratus persen sehingga manajer bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya sendiri dan tidak didasarkan pada maksimalisasi nilai dalam keputusan pendanaan.

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut “Nexus of Contract”. Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan perilaku efisiensi atau perilaku opportunistik bagi pihak agen. Di organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar ataupun tidak sadar, teori keagenan ini telah dipraktikan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia.

Penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku opportunistik. Menurut Gudono (2009), menyatakan bahwa teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan

mereka sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, teori keagenan (*agency theory*) menimbulkan dua masalah, yaitu: *principal-agent problem*, yang disebut dengan agensi dilema, adalah masalah atau konflik yang timbul karena agen melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya dengan mengeksploitasi keunggulan informasi yang dimilikinya, namun merugikan prinsipal, dimana akan menimbulkan *agency cost*. Menurut Gudono (2009), menyatakan bahwa *adverse selection* atau pilihan buruk terjadi saat prinsipal tidak mengetahui kemampuan agen sehingga membuat pilihan yang buruk mengenai agen. Menurut Gudono (2009), menyatakan bahwa *moral hazard* (bencana moral) terjadi pada saat pihak agen secara sadar memiliki keunggulan informasi namun tidak memenuhi kontrak yang telah disetujuinya dengan prinsipal.

Menurut penelitian Rizani (2014), hubungan antara prinsipal dan agen dalam teori agensi adalah hubungan antara sisi superior (sebagai kepala) dan perintah (sebagai agen) yang menyatakan bahwa hubungan antara pemilik dan manajer dibuat sulit karena terjadinya benturan kepentingan. Pada hal ini menjadikan konflik yang disebabkan oleh kepentingan berbeda antara prinsipal dan agen yang disebut masalah keagenan. Pada hubungan antara prinsipal dan agen tersebut dengan asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menghasilkan konflik kepentingan. Asumsi yang diberikan pondasi pada teori agensi ialah: (a) asumsi manusia yang dikategorikan menjadi tiga hal yaitu: kepentingan diri sendiri, dibatasi-rasionalitas, dan penghindaran risiko. (b) asumsi organisasi yang dikategorikan

menjadi tiga hal yaitu: konflik sebagai bagian dari tujuan antara peserta lain, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan asumsi informasi antara pemilik dan agen.

Keterkaitan akuntabilitas yang dapat dijelaskan menggunakan teori keagenan. Pengertian akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah. Pemerintah (*agent*) memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan memberikan informasi segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada setiap pihak pemberi amanah. Menurut Haspiarti (2012), masyarakat (*principal*) sebagai pemberi amanah yang diwakili oleh DPRD memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Keterkaitan transparansi yang dapat dijelaskan menggunakan teori keagenan yaitu dimana pemerintah (*principal*) mendelegasikan wewenangnya kepada masyarakat (*agen*) untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Berarti agen harus melaporkan keuangannya secara transparansi, agar *principal* itu lebih percaya dalam suatu pengelolaan anggaran secara terbuka.

2.2.2 Konsep Kinerja

Menurut Bastian (2010), menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dalam suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Pertama, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri. Kedua, melihat kinerja organisasi publik dari persepektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Kedua perspektif tersebut saling berinteraksi di antara keduanya, karena pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik sangat terkait erat dengan lingkungan tempat organisasi publik hidup dan berkembang. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas dalam suatu kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Konsep yang sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik daerah sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran.

2.2.3 Penilaian dan Pengukuran Kinerja

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Penilaian kinerja sebagai evaluasi kinerja karyawan saat ini/atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya (Dessler, 2009). Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka

bekerja. Model penilaian kinerja yang dicontohkan oleh Dessler (2009:135) meliputi indikator sebagai berikut kualitas kerja adalah akurasi, ketelitian, dan bisa diterima atas pekerjaan yang dilakukan, produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu, pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi praktis/teknis yang digunakan pada pekerjaan, bisa diandalkan adalah sejauh mana seorang karyawan bisa diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas, kehadiran adalah sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati periode istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan, dan kemandirian adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa pengawasan.

2.2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) merupakan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen (Akbar, 2012). Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yaitu *accountability for probity and legality*, *process Accountability*, *performance Accountability*, *programme Accountability*, *policy Accountability*.

Menurut Ismiarti (2013), menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diartikan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Annisaningrum, 2010). Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban dana public, penyajian tepat waktu, dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Konsep-konsep akuntabilitas tersebut diatas, dapat diklasifikasikan beberapa indikator akuntabilitas yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan; pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku; adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi;

konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.2.5 Transparansi

Annisaningrum (2010), menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanyapublikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan prilaku menyimpang dari aparat

birokrasi. Menurut Wiranto (2012), menyatakan bahwa untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

Prinsip-Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip Good Governance. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut

publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya; publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah; transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga; kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.

2.2.6 Value for Money

Menurut Victorinus Laoli (2019), menyatakan bahwa *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersamaan. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E . Ekonomis adalah hemat atau tepat guna, efisien adalah output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya, dan efektivitas adalah kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara garis besar penerapan penilaian kinerja dengan konsep *Value for Money* dibagi menjadi dua indikator kinerja, yaitu: 1) Indikator alokasi biaya (meliputi elemen ekonomi dan efisiensi), dan 2) Indikator kualitas pelayanan (elemen efektivitas). Menurut Mardiasmo dalam jurnal Nugrahani (2007),

penerapan konsep *Value for Money* (VFM) penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat.

Konsep pokok *value for money* antara lain:

1. Ekonomi: Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi: Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas: Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Indikator *Value For Money*, meliputi:

a. Input

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh input adalah jumlah pegawai dalam Pemerintahan Kota Surabaya. Input juga dapat dinyatakan dengan nilai uang, misalnya gaji para pegawai.

b. Output

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Mengukur output lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial, seperti pendidikan, keamanan atau kesehatan. Sebagai contoh output yang dihasilkan oleh dinas keamanan adalah tegaknya hukum dan peraturan atau rasa aman masyarakat. Ukuran output tersebut merupakan turunnya angka kriminalitas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti peran pendidikan dan perbaikan ekonomi.

c. Outcome

Outcome merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Contohnya yaitu outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai.

Langkah-langkah pengukuran dalam *value for money*:

1. Pengukuran ekonomi: Pengukuran relatif, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.
2. Pengukuran efisiensi: Diukur dengan rasio antara output berupa barang dan layanan berupa input berupa pelanggan/masyarakat yang membutuhkan layanan. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3. Pengukuran efektivitas: Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

2.2.7 Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu (Munandar, 2011). Anggaran sektor publik merupakan suatu alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga anggaran sektor publik harus memenuhi kriteria:

- a) Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
- b) Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.
- c) Anggaran juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam anggaran sektor publik, aspek yang perlu diperhatikan yaitu:
 - Aspek penganggaran
 - Aspek pengendalian

Prinsip-prinsip penganggaran sektor publik (Bastian, 2014), meliputi:

1. Demokratis yaitu suatu anggaran yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran harus ditetapkan melalui proses pengikutsertaan sebanyak mungkin untuk masyarakat.

2. Adil merupakan anggaran yang diarahkan dengan cara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara ukurannya dialokasikan bagi semua kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
3. Bermoral tinggi merupakan suatu pengelolaan anggaran yang berpegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku dan senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.

Tujuan utama dalam penyusunan anggaran (Robert & Vijay, 2009):

1. Menyesuaikan rencana strategis.
2. Membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
3. Menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
4. Memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

Anggaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran, yaitu:

1. Anggaran operasional
- d. Anggaran pendapatan

Anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang akan dibuat oleh organisasi untuk memperoleh pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen, atau kelompok wiraniaga.

e. Anggaran biaya

Anggaran biaya adalah suatu rencana biaya yang akan dikeluarkan oleh organisasi untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan.

f. Anggaran laba

Anggaran laba merupakan besarnya laba yang ingin diperoleh organisasi dalam suatu periode di masa yang akan datang. Anggaran laba yaitu gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya.

2. Anggaran keuangan, mencakup beberapa anggaran yaitu:

a. Anggaran investasi

Rencana organisasi untuk membeli barang-barang modal atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk organisasi di masa yang akan datang dalam jangka panjang.

b. Anggaran kas

Suatu rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas organisasi di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.

c. Proyeksi neraca

Kondisi dimana keuangan yang dapat diinginkan oleh organisasi di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Proyeksi neraca mencakup jumlah harta ingin dimiliki organisasi kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan organisasi di masa mendatang.

2.2.8 Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran yaitu suatu proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi (Reyowijoyo, 2013).

Jenis anggaran sektor publik:

- a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD
- b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu suatu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik swasta.

Fungsi anggaran sektor publik (Mahsun, dkk, 2012) yaitu:

1. anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat koordinasi dan alat komunikasi intern
4. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal
5. Anggaran sebagai alat penilaian kerja
6. Anggaran sebagai alat instrument politik
7. Anggaran sebagai alat pemotivasi
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

2.2.9 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kinerja anggaran selama ini, proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBD serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), umumnya perhatian lebih terfokus pada besarnya anggaran. Penyusunan anggaran lebih menekankan pada input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja anggaran lebih mengutamakan penyerapan anggaran dibandingkan melakukan penghematan dana anggaran sehingga banyak anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak terjadi efisiensi anggaran, dan banyak penggunaan anggaran yang meyimpang dengan tujuan atau target kebijakan pemerintah. Untuk menghindarkan penyalahgunaan anggaran, perlu dikembangkan sistem anggaran APBD yang berbasis kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Artinya penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tapi juga harus memperhatikan kinerja anggaran tersebut yang meliputi capaian kinerja, keluaran, hasil dan manfaat serta tepat tidaknya kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai anggaran. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi

pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Pengukuran kinerja berdasarkan alokasi biaya dan pelayanan yang menekankan pada tiga elemen utama ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk menerapkan kinerja anggaran berkonsep *value for money*, maka sangat diperlukan akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan anggaran. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan teori keagenan. Pengertian akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah. Pemerintah (*agent*) memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan memberikan informasi segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada setiap pihak pemberi amanah. Menurut Haspiarti (2012), masyarakat (*principal*) sebagai pemberi amanah yang diwakili oleh DPRD memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia (2011), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

2.2.10 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Transparansi merupakan informasi keuangan yang diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah. Kinerja anggaran selama ini memiliki kelemahan perencanaan dalam pengalokasian anggaran belanja menyebabkan lemahnya kinerja pemerintah, sehingga ada unit kerja yang kelebihan pembiayaan dan ada pula unit kerja yang kekurangan pembiayaan.

Unit kerja yang kelebihan pembiayaan mengakibatkan penghematan dan efisiensi menjadi rendah, sedangkan ada unit kerja yang kekurangan pembiayaan mengakibatkan efektivitas menjadi rendah untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kesenjangan yang lebar antara kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaran yang dapat disediakan akan menimbulkan pengalokasian anggaran yang buruk apabila arah dan prioritas penggunaan anggaran tidak terdefinisi dengan baik, proses pengalokasian anggaran tidak sistematis, dan praktik penganggaran yang tidak transparan karena lemahnya persyaratan kelayakan pembiayaan.

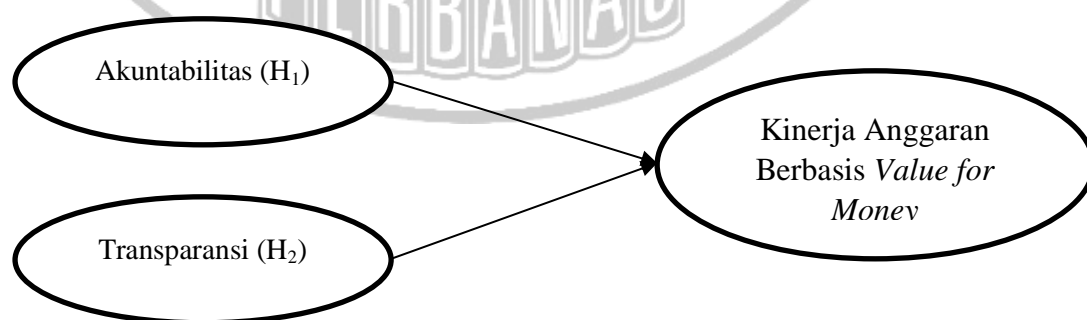
Untuk menghindari pengalokasian anggaran yang buruk diperlukan suatu sistem kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Artinya penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tapi juga harus memperhatikan kinerja anggaran tersebut yang meliputi capaian

kinerja, keluaran, hasil dan manfaat serta tepat tidaknya kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai anggaran. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Pengukuran kinerja berdasarkan alokasi biaya dan pelayanan yang menekankan pada tiga elemen utama ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk menerapkan kinerja anggaran berkonsep *value for money*, maka sangat diperlukan transparansi dari pemerintah. Transparansi bukan sekedar keterbukaan dalam menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia (2011), yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hasil kerangka pemikiran yang telah tergambar diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel independen dalam penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi yang akan dibuktikan pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Garini (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Jika semakin kuat penerapan akuntabilitas, maka semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hal ini dikarenakan untuk bisa menghasilkan suatu kinerja anggaran yang baik maka dibutuhkan pertanggungjawaban anggaran agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang diharapkan.

Transparansi merupakan memberikan suatu informasi laporan keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Garini (2011), yang menyatakan bahwa transparansi (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran yang berkonsep *value for money* untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kuat transparansi, maka semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

1.4. Hipotesis Penelitian

Berikut hipotesis dalam penelitian ini:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*

H₂: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*

